

Perbandingan Strategi Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Malaysia

Shelvia Arnie Putri^{a,*}, Timbul Dompok^b

^{ab}Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam, Kota Batam

email:pb221010009@upbatam.ac.id

Abstract

Countries' reactions to the global pandemic vary greatly. Public support and government policies are crucial to managing the pandemic's success. It has a significant economic impact as it has been challenged for some time by several countries. However, some countries are also dealing well enough to prevent an increase in Covid-19 cases and protect their economies. Malaysia is among the countries that, along with New Zealand, Taiwan, and China, have the honorable ability to curb the spread of the virus and restore economic normality in the face of the Covid-19 epidemic. This article explains how the country's capacity is capable of becoming a major capital in dealing with the pandemic in Malaysia. Adequate state capacity will be able to generate public confidence so that that confidence can be a catalyst for successful policy implementation. In addition to national capacity, leadership aspects at the national and local levels play an important role in supporting the success of government policies. Effective leadership can promote a favourable atmosphere for public adherence to government policies. Like a common enemy, the support of community elements is crucial to success against the spread of the virus.

Keyword: Covid-19, Increase in Covid-19 cases.

Abstrak

Negara-negara bereaksi terhadap pandemi global sangat bervariasi. Dukungan publik dan kebijakan pemerintah sangat penting untuk mengelola keberhasilan pandemi. Ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan karena telah dipertentangkan selama beberapa waktu oleh beberapa negara. Namun, beberapa negara juga menangani cukup baik untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19 dan melindungi ekonomi mereka. Malaysia termasuk di antara negara-negara yang, bersama dengan Selandia Baru, Taiwan, dan China, memiliki kemampuan yang terhormat untuk menahan penyebaran virus dan memulihkan normalitas ekonomi di hadapan epidemi Covid-19. Artikel ini menjelaskan bagaimana kapasitas negara ini mampu menjadi modal utama dalam menangani pandemi di Malaysia. Kapasitas negara yang memadai akan dapat menghasilkan kepercayaan publik sehingga kepercayaan itu dapat menjadi katalis untuk implementasi kebijakan yang sukses. Selain kapasitas nasional, aspek kepemimpinan di tingkat nasional dan lokal memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah. Kepemimpinan yang efektif dapat mempromosikan suasana yang menguntungkan untuk kepatuhan publik terhadap kebijakan pemerintah. Seperti musuh bersama, dukungan dari elemen komunitas sangat penting untuk keberhasilan melawan penyebaran virus.

Kata Kunci: Covid-19 Peningkatan Kasus Covid-19.

PENDAHULUAN

Satu pandemi dalam ingatan baru-baru ini adalah penyebaran Covid-19. Di tengah globalisasi yang dipercepat dan dorongan yang signifikan untuk inovasi data, ekspansi ini menimbulkan resistensi yang semakin rumit dan mencolok. Setelah COVID-19 diumumkan, dampaknya pada rumah tangga global dan ekonomi politik mulai menarik perhatian sekali lagi. Dalam kasus bahwa pandemi sebelumnya telah menyebar di antara manusia oleh perantara atau entitas sensitif tertentu, Covid

19 memiliki koordinat inter-manusia virus yang khas (Shereen et al., 2020).

Munculnya pandemi Covid-19 menyajikan posisi yang membingungkan bagi pemerintah di berbagai negara. Untuk bernegosiasi dan menanggapi yang lebih luas, mereka dipaksa untuk menuntut langkah-langkah yang signifikan. Setelah beberapa waktu tampak kecewa dan terkejut dengan tingkat ketidakpuasan dan efek COVID-19, pemerintah Indonesia mengambil tindakan yang signifikan untuk melakukan negosiasi yang lebih efektif

dengan yang lebih besar (Mas'Udi & S Winanti, 2020).

Komite Manajemen Bencana Negeri Sarawak menyatakan bahwa kematian pertama di Malaysia terjadi pada 17 Maret 2020, ketika seorang pendeta berusia 60 tahun di Sarawak meninggal karena COVID-19. Selain itu, KKM mengatakan 673 kasus COVID-19 telah dilaporkan, dua di antaranya terkait dengan pertemuan keagamaan Jamaah Tablig yang berlangsung di Masjid Jameek di Kuala Lumpur dari 27 Februari hingga 1 Maret 2020. Setidaknya 16.000 orang hadir untuk acara ini, dengan 1.500 dari mereka datang dari luar negeri. Ini adalah kasus yang dikatakan telah memulai pandemi Covid-19 di Asia Tenggara (Barker & Anne, 2020).

Pada hari beberapa waktu lalu pemerintah benar-benar bereaksi dengan mengeluarkan pendekatan yang akan diperbarui pada Walk 18, 2020, yang dikenal sebagai Perintah Pergerakan Kawalan (PKP) Malaysia 2020 (Bunyan, 2020). Langkah ini ditujukan untuk mengantisipasi populasi yang lebih luas dari menjadi tercemar dengan Covid-19, serta memberikan ruang kepada pemerintah untuk upaya pemulihan selama mungkin. Pendekatan ini mencakup larangan yang harus dihindari oleh warga Malaysia khususnya:

- (1) Boikot komprehensif terhadap versatilitas dan massa menghidupkan kembali di seluruh negara dengan menghitung olahraga, olahraga, latihan sosial dan sosial. Semua rumah-rumah penghormatan dan dunia perdagangan, tetapi toko-toko makanan, pasar konvensional, dan toko pasokan dasar yang menawarkan poo masih diizinkan untuk berfungsi. Bagi kaum Muslimin, semua latihan taat di dalam masjid dan surau yang menghitung Jumat Salat terlalu dibatalkan;
- (2) pembatasan menyeluruh dari semua perjalanan warga Malaysia ke luar negeri, bersama-sama mereka yang telah kembali dari luar negeri wajib menjalani pemeriksaan restoratif dan pengasingan sengaja selama 14 hari;
- (3) pembatalan pada semua pengunjung luar dan orang asing dalam setiap perdagangan ke Malaysia;
- (4) penutupan semua sekolah di semua tingkatan, baik sekolah terbuka maupun swasta;
- (5) penutupan semua latihan instruksional di tingkat perguruan tinggi dan sekolah di seluruh negeri; dan
- (6) di dekat semua tempat kerja pemerintah dan tempat kerja swasta, tetapi yang terkunci di administrasi terbuka penting keberadaannya, khususnya air, listrik, siaran komunikasi, pos, transportasi, sistem air, minyak, gas, penyiaran,

belakang, manajemen rekening, panci, toko obat, petugas kebakaran, dompet.

METODE PENELITIAN

Satu poin perbandingan yang dapat dibuat adalah strategi penelitian yang digunakan oleh penulis. Jenis penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif ketika dua atau lebih situasi, peristiwa, kegiatan, program, dll yang sebanding atau identik dibandingkan. (Syao dih, 2007) berbicara tentang penerapan taktik perpustakaan. Selain taktik ini, mereproduksi data eksperimental yang merupakan fokus komposisi berguna dari sudut pandang bibliografis. Taktik ini digunakan dengan tepat sebagai cara mengelilingi keterbatasan penulis untuk menyelam langsung ke area dalam ekspansi untuk berfungsi sebagai bantuan bibliografis.

Menggunakan strategi menulis saat mempertimbangkan adalah metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam analisis ini. Data pendukung bervariasi di antara mereka: berita media cetak dan online tentang COVID-19 yang secara luas disebarkan dengan fasilitas pemeriksaan di dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Alasan penulis memilih dua negara ini adalah karena keduanya mewakili spektrum luas dari strategi administrasi. Sumber daya tambahan dalam kerangka rekaman video telah diperiksa lagi untuk mempromosikan ekspansi global Covid-19, tanggapan negara-negara yang terkena dampak, dan pengaruhnya pada isu-isu sosial. Informasi adalah data yang telah diproses oleh pencipta melalui navigasi sederhana.

HASIL PENELITIAN

Pandemi yang mengguncang dunia

Berasal dari Wuhan, China, strain kontemporer virus - kemudian diidentifikasi sebagai SARS Cov-2 - telah menyebar dengan cepat ke negara-negara di seluruh dunia. Reaksi negara terhadap COVID-19 telah mengalami perubahan signifikan. Ketika ada kepemimpinan yang kuat yang orang bereaksi dengan antusias, sebuah negara dikatakan responsif dalam administrasi pandemi. Kemampuan suatu negara untuk menahan tingkat infeksi dan kematian, berurusan dengan individu yang terinfeksi, dan secara efektif memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk melawan bencana dan akibatnya juga menentukan seberapa siap suatu negara (Berty, 2020). Selain memantau dampak sosial-ekonomi, regulasi komprehensif juga mencakup seluruh siklus darurat, dimulai dengan respons krisis. Negara telah mengambilnya untuk membatasi penyebaran infeksi.

Kapasitas aset yang signifikan diperlukan untuk mengatasi COVID-19 dan dampaknya. Sumber daya besar dikirim ke negara-negara tertentu untuk memerangi pandemi, melestarikan ekonomi, dan memungkinkan orang untuk menjalani kehidupan normal melalui jaminan sosial dan program jaminan keuangan lainnya. Tindakan cepat yang diambil setiap negara sebagai tanggapan terhadap COVID-19 sangat penting untuk stabilitas keuangan rakyatnya dan prevalensi penyakit. Indonesia, seperti negara-negara lain yang terkena dampak, melakukan segalanya untuk menghentikan penyebaran pandemi. Pemerintah Indonesia telah secara teratur memberlakukan pembatasan pada latihan dan menutup akses ke wilayah ini karena wilayah dan populasi yang luas di negara itu.

Di Asia Tenggara, Indonesia adalah negara dengan populasi terbesar. India berada di posisi untuk memulai dengan yang paling tebal di Asia Selatan, seperti ini. WHO sedang mempertimbangkan apakah kedua negara dapat mengakhiri epicenter yang kurang digunakan karena keadaan saat ini, yang mempengaruhi mereka. Menurut Diah Saminarsih, penasihat senior tentang seks dan pemuda untuk WHO, jika kedua negara tidak dapat menahan bencana, Asia Tenggara akan berubah menjadi hotspot global, mempengaruhi Amerika dan Eropa (Pranita & Nursastri, 2020). Pemerintah setiap negara mungkin merasa sulit untuk memutuskan pengaturan mereka.

Kesulitan lain dalam memantau Covid 19 secara luas adalah keragaman yang luas dalam populasi manusia saat ini. Covid 19 juga berubah ketika populisme - rezim politik patriot, anti-ilmu - harus menyelidiki undang-undang yang terkait dengan perumahan di beberapa negara. Kondisi di mana pemerintah harus membuat kesepakatan jangka panjang yang masuk akal daripada strategi populis jangka pendek yang menekankan pentingnya menggabungkan kontrol. KPK pada tahun 2020. Dengan mengorbankan pengeluaran administratif dan kemanusiaan darurat, karakter pandemi telah dimanfaatkan sebagai alat politik oleh individu atau kelompok.

Penanganan Covid-19 yang di Malaysia Selama Krisis Pandemi

Beberapa wilayah di Malaysia memiliki kebijakan yang berbeda pada saat CPP dimulai. Hal ini disebabkan oleh tingkat infeksi yang tinggi. Perintah Pengendalian Gerakan yang Diperkuat (PKPD), kebijakan unik yang mencakup beberapa bagian Kuala Lumpur, Selangor, dan Johor, berlaku selama 14 hari. Pemerintah melarang semua penduduk dan

pengunjung dari wilayah yang ditunjuk untuk melakukan hal-hal berikut: (1) meninggalkan rumah mereka; (2) mengizinkan non-resident dan non-visitors dari luar wilayah masuk; (3) menutup semua bisnis; dan (4) memberikan bantuan yang cukup untuk semua penduduk selama periode empat belas hari. (5) Tentara dan polisi mempertahankan setiap rute yang mengarah ke wilayah-wilayah (Nursyazwani 2020).

Dalam pidato resmi Hari Buruh pada 1 Mei 2020, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan kebijakan progresif yang disebut Perintah Pengendalian Gerakan Bersyarat. (PKPB). Untuk membuka operasi ekonomi negara sambil mempertahankan pengawasan yang ketat, strategi ini adalah jenis relaksasi dari eksekusi PCP (Ananthalakshmi & Sipalan, 2020). Ketika kecepatan transmisi dan penyebaran Covid-19 mulai diatur secara efektif, ini adalah ketika itu dilakukan. Berikut adalah beberapa kriteria baru dalam CCP: (1) Hampir semua sektor dan kegiatan ekonomi diizinkan beroperasi selama mereka mematuhi prosedur operasi bisnis standar (SOP), yang mencakup penahanan sosial dan melacak nama pelanggan, nomor telepon, dan tanggal kunjungan; (2) Berpartisipasi dalam acara olahraga apa pun di dalam stadion atau bangunan yang melibatkan kerumunan besar, kontak fisik, atau kemungkinan transmisi dilarang. (outside). (3) Semua bentuk pertemuan dan acara resmi, serta pertemuan sosial, budaya, dan massal dilarang. (3) Perjalanan antara provinsi, termasuk kebiasaan kembali ke desa pada hari Lebaran, juga dilarang, kecuali diperlukan untuk kembali kerja atau untuk mempertahankan di desa atau di tempat lain dengan izin dari polisi setempat. (4) Aktivitas keagamaan dan semua kegiatan keagungan atau pertemuan di rumah ibadah juga dilarang (Jaya, 2020).

Keberhasilan pengembangan penanganan Covid-19 di Malaysia ditunjukkan oleh kebijakan yang dikenal sebagai Order Recovery Movement Control (PKPP), yang menggantikan PKPB dan berlaku dari 10 Juni hingga 31 Agustus (Fukuyama, 2020). Orang sekarang memiliki lebih banyak fleksibilitas untuk pergi tentang kehidupan sehari-hari mereka sambil masih mengikuti SOP berkat peraturan ini. (SOP). Aktivitas tertentu tetap dilarang, termasuk olahraga terorganisir, klub malam, SPA, karaoke, dan acara keagamaan skala besar, serta perjalanan internasional (Sarhan & Rahim, 2020).

Tanggapan pemerintah terhadap tingkat penyebaran Covid-19 di seluruh negara tercermin dalam dinamika implementasi kebijakan PKP hingga PKPP. Grafik di bawah

ini menunjukkan bagaimana pertumbuhan dan penurunan Covid-19 di Malaysia secara signifikan mempengaruhi keputusan kebijakan pemerintah. Hal ini memungkinkan untuk membatasi tingkat kematian, menjaga tingkat pemulihan meningkat, dan meminimalkan terjadinya kasus baru (Ladiqi, 2020).

Kekacauan Indonesia Hadapi Krisis Pandemi

Kasus Covid-19 yang dikonfirmasi secara universal telah mencapai 88.948 sejak Walk 2, 2020, ketika kasus asli dikonfirmasi di Indonesia. Laporan Situasi 2 WHO termasuk Indonesia bersama dengan lima negara lain, yaitu Armenia, Republik Ceko, Republik Dominika, Luksemburg, dan Islandia, dan berisi kasus pertama yang dikonfirmasi dari COVID-19 di Indonesia (WHO, 2020). Sebuah pembekuan tiba-tiba telah dikenakan pada semua front, termasuk pemerintah pusat, tingkat pemerintah terdekat, dan masyarakat umum, karena peningkatan keadaan darurat. Dalam situasi ini, legislator ditugaskan untuk membuat rencana yang dapat mengurangi kemungkinan konflik yang disebabkan oleh COVID-19 (Fakhruroji et al., 2020).

Seminggu setelah kasus penting dikonfirmasi dan kasus berkembang, berbagai partai mulai mengumpulkan suara untuk bar, seperti yang telah muncul oleh negara-negara lain seperti China. Tetapi panggilan lockdown ini tidak mengguncang pemerintah. Presiden Joko Widodo menerima bahwa penyebaran Covid 19 dapat dilakukan melalui partisi fisik. Terlepas dari fakta bahwa IDI mengakui bahwa pemisahan regional lebih bermanfaat dalam memotong rantai penyebaran Covid-19 daripada penggunaan UNFPA, beban kuartal teritorial belum dihadapkan oleh Joko Widodo atas pertimbangan terkait uang, topografi, sosial, dan sosiologis orang Indonesia yang bertentangan dengan negara-negara lain yang telah memperbarui ruang (Widaningrum & Mas'udi, 2020). Dalam pemahaman dengan Joko Widodo, pemisahan lokal tidak dipilih setelah membandingkan jalur tindakan negara-negara lain yang dipertimbangkan sebagai tidak menjamin penggunaan yang meyakinkan dari isolasi regional tanpa menyebabkan masalah (Shihab, 2020).

PSBB di Jakarta mengklaim DKI, sebagai sketsa, dipamerkan pada pertengahan April 2020. Kemudian diikuti oleh kota-kota besar lainnya (Carina, 2020). Terlepas dari kenyataan bahwa PSBB diperbarui, orang-orang masih diizinkan untuk meminta absen dari rumah mereka dengan mengambil setelah tradisi kesejahteraan telah disetujui. Eksekusi yang dibatasi oleh UNFPA di banyak zona tidak dan tidak segera diikuti oleh komunitas. Sebagai

ilustrasi, swarms masih ditemukan dalam pola beberapa bagian wilayah DKI Jakarta hingga seminggu sejak PSBB diperbarui. Masih ada beberapa pengendara sepeda motor yang tidak memakai selimut dan memiliki clamps. Begitu juga dengan pedagang yang menawarkan perdagangan mereka. Di tengah-tengah masa eksekusi besar PSBB di Jakarta, Polda Metro telah mendaftarkan 32.300 kendaraan yang melanggar aturan (Ravel & Kurniawan, 2020). Dalam kasus yang Anda lihat pada awal kronologi tanggapan pemerintah terhadap Covid 19 mencapai jauh, ada empat faktor yang telah menyebabkan ketidakpuasan terhadap keamanan Pemerintah Indonesia.

Pertama, respon tanpa pertahanan yang dimulai terhadap Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari respon 'menenangkan' yang dikembangkan oleh para spesialis terhadap gangguan koordinasi antara spesialis sentral dan regional. Krisis komunikasi telah menyebabkan variasi Covid-19 dari norma di sejumlah daerah yang dikelompokkan dan terkoordinasi. Kondisi ini jelas karena berbagai alasan yang menimbulkan keraguan terbuka dari pemerintah. Studi oleh INDEF muncul bahwa 66,3% dari penilaian negatif yang difasilitasi bukan untuk pemerintah secara kolektif tetapi untuk Presiden dan Manfaat Kesejahteraan, atau sebuah studi yang dilakukan oleh change.org yang mencatat 69,3% dengan boikot jika pemerintah tidak terjebak dalam masalah Covid-19 pada awalnya. (Pagiwati & Sri, 2020). Tetapi keyakinan orang dapat digunakan sebagai modal dalam membangun komunikasi partisipatif, yaitu, komunikasi berbasis ilmu.

Kedua, otorisasi yang sah tidak sempurna. Beberapa orang melanggar aturan untuk berbagai alasan. Beban sanksi masih sekelompok sanksi sosial dan belum sepenuhnya diubah (Sulasih, 2020). Beban menjalankan penampilan tanpa mata-mata dan pengintai yang ketat tidak akan memiliki dampak mengerikan pada kliennya. Terlepas dari kenyataan bahwa hukum telah mengeluarkan hal-hal yang berbeda yang mengendalikan secara rinci kursus tindakan anti-Covid-19, masih ada banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang membersihkan diri mereka sendiri. Biasanya suatu keadaan, tentu saja, mengingat bahwa eksekusi hukuman akan kontraproduktif pada kesempatan yang ditolak dengan hukuman pidana.

Ketiga, warga Kota Tangerang. Bolster dapat menjadi derajat yang menentukan dalam kesesuaian pemahaman. Budaya partisipasi politik melibatkan individu untuk bertindak dengan atau tanpa pengamatan gadget. Mindfulness tinggi dan kembali yang disengaja

adalah bagian terpenting dari perawatan Covid-19 dalam ekspansi ke strategi lain. Hal ini diakui oleh Presiden Korea Selatan dan dikonfirmasi kembali oleh Kim Chang Beom, mantan utusan Korea Selatan ke Indonesia. Dia mengatakan bahwa dalam pengembangan untuk melakukan tes, mengikuti dan menangani strategi, kesadaran warga telah menjadi penting karena di Korea Selatan, setiap warga negara diminta untuk menanggung aturan terpisah, mendidik langkah-langkah keamanan orang dan terus mengambil informasi. Bentuk-bentuk yang terbatas dari harapan dan isolasi diri.

Ada peningkatan berkelanjutan dalam kasus Covid-19, dan ada pelanggaran yang luas terhadap pedoman pemisahan fisik. Ini mungkin menunjukkan bahwa beberapa anggota masyarakat belum sepenuhnya merangkul kebijakan pemerintah. Perubahan dalam perilaku terbuka diharapkan oleh hampir Covid-19 penipuan dan kekecewaan untuk mengganggu rantai distribusi. Harus ada keputusan yang kuat dan valid untuk mengatasi masalah risiko nasional.

Pembahasan Perbandingan Strategi Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Penanganan Covid-19

Berdasarkan dokumen yang disediakan, perbandingan strategi pemerintah dalam menangani Covid-19 antara Indonesia dan Malaysia dibahas. Malaysia, bersama dengan negara-negara seperti Selandia Baru, Taiwan, dan China, telah berhasil menghentikan penyebaran virus dan memulihkan normalitas ekonomi. Di sisi lain, Indonesia, seperti negara-negara lainnya yang terkena dampak, telah mengambil langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran pandemi, termasuk memberlakukan pembatasan lalu lintas dan menutup area tertentu.

Strategi pemerintah Malaysia dalam menangani kasus covid 19 dan mengurangi wabah covid 19 dengan cara pemerintah Malaysia telah menerapkan strategi yang efektif untuk menangani Covid-19 dan mengurangi penyebaran pandemi. Malaysia, bersama dengan negara-negara seperti Selandia Baru, Taiwan, dan China, telah berhasil menahan penyebaran virus dan mengembalikan normalitas ekonomi. (1). Kapasitas dan aspek kepemimpinan negara di tingkat nasional dan lokal memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengelola pandemi. (2). Dukungan publik dan kebijakan pemerintah ditekankan sebagai elemen penting dalam mengelola keberhasilan respons pandemi (3). Kepemimpinan yang efektif di Malaysia telah mempromosikan suasana yang

menguntungkan untuk kepatuhan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam memerangi penyebaran virus (4).

Secara spesifik penanganan pemerintah Indonesia kepada masyarakat dalam mengurangi kasus covid 19 pemerintah Indonesia telah menerapkan langkah-langkah untuk menghentikan penyebaran pandemi Covid-19. Presiden Joko Widodo mengakui bahwa penyebaran COVID-19 dapat terjadi melalui kontak fisik dan menganggap pemisahan regional lebih menguntungkan dalam memotong rantai transmisi Covid-19. Namun, pemisahan regional tidak dipilih karena pertimbangan terkait dengan faktor keuangan, topografi, sosial, dan sosiologis dari populasi Indonesia. Pemerintah telah mengambil tindakan seperti memberlakukan pembatasan lalu lintas dan menutup area tertentu untuk mencegah penyebaran virus. pemerintah Indonesia telah memberlakukan pembatasan pada latihan dan menutup akses ke wilayah tertentu sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19

KESIMPULAN

Berdasarkan artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa Malaysia dan Indonesia memiliki strategi yang berbeda dalam penanganan pandemi Covid-19. Malaysia berhasil menahan penyebaran virus dan melindungi ekonomi mereka dengan kebijakan yang berbeda seperti PKPD, PKPB, dan PKPP. Sementara itu, Indonesia juga memiliki berbagai kebijakan seperti PSBB di Jakarta, namun respons pemerintah di kedua negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Faktor-faktor seperti respon tanpa pertahanan, otorisasi yang tidak sempurna, dan partisipasi masyarakat yang berbeda mempengaruhi hasil penanganan pandemi di kedua negara. Perbandingan strategi pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam menangani Covid-19 menunjukkan perbedaan pendekatan dan hasil yang dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananthalakshmi, A., & Sipalan, J. (2020). *How mass pilgrimage at Malaysian mosque became coronavirus hotspot*. Reuters. 17 March 2020.
- Fakhruroji, M., Tresnawaty, B., Sumadiria, H., & Risdayah, E. (2020). Strategi komunikasi publik penanganan COVID-19 di Indonesia: Perspektif sosiologi komunikasi massa dan agama. *LP2M UIN Sunan Gunung Djati*.
- Fukuyama, F. (2020). The pandemic and political order. *Foreign Aff.*, 99, 26.
- Ladiqi, S. (2020). State Capacity and Public Trust in Handling the COVID-19

- Outbreak in Malaysia Kapasitas Negara dan Kepercayaan Publik dalam Penanganan Wabah Covid-19 di Amerika Tengah serta Eropa Timur dan Asia Timur menandai. *Global and Strategis*, 14(2), 257–274.
- Mas'Udi, W., & S Winanti, P. (2020). *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*.
- Shereen, M. A., Khan, S., Kazmi, A., Bashir, N., & Siddique, R. (2020). COVID-19 infection: Emergence, transmission, and characteristics of human coronaviruses. *Journal of Advanced Research*, 24, 91–98.
- Sulasih, R. R. E. S. (2020). Ketidakefektifan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *Binamulia Hukum*, 9(1), 67–82.
- Widaningrum, A., & Mas'udi, W. (2020). Dinamika Respons Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid-19. *Tata Kelola Penanganan Covid-19 Di Indonesia: Kajian Awal*, 46–63.
- Barker, & Anne. (2020, Maret 19). *Coronavirus COVID-19 cases spiked across Asia after a mass gathering in Malaysia. This is how it caught the countries by surprise*. Retrieved from ABC NEWS: <https://www.abc.net.au/news/2020-03-19/coronavirus-spread-from-malaysian-event-to-multiple-countries/12066092>
- Berty, T. T. (2020, MARET 13). *WHO Surat Jokowi, Minta RI Umumkan Darurat Nasional Virus Corona COVID-19*. Retrieved from Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/global/read/4201537/who-surati-jokowi-minta-ri-umumkan-darurat-nasional-virus-corona-covid-19>
- Bunyan, J. (2020, MARET 16). *PM: Malaysia under movement control order from Wed until March 31, all shops closed except for essential services*. Retrieved from MALAYMAIL: <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2020/03/16/%20pm-malaysia-in-lockdown-from-wed-until-march-31-%20all-shops-closed-except-for/1847204>
- Carina, J. (2020, APRIL 9). *Berlaku 14 Hari, Penerapan PSBB di Jakarta Sampai 23 April 2020*. Retrieved from Kompas.com: <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/04/09/23332221/berlaku-14-hari-penerapan-psbb-di-jakarta-sampai-23-april-2020>
- Jaya, P. (2020, MEI 1). *Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat akan dilaksana - Muhyiddin*. Retrieved from BERNAMA.COM: <https://www.bernama.com/bm/news.php?id=1837419>
- Pagiwati, & Sri, R. (2020, JULY 30). *Webinar FISIP UI 2020 - Seri 01 : Komunikasi Publik Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19*. Retrieved from Webinar FISIP UI : <https://www.youtube.com/watch?v=0vwFmk9eHcl>
- Pranita, E., & Nursastri, S. A. (2020, APRIL 10). *Pakar Peringatkan, Indonesia dan India Berpotensi Jadi Episenter Baru Covid-19*. Retrieved from KOMPAS.COM: <https://www.kompas.com/sains/read/2020/04/10/180200123/pakar-peringatkan-indonesia-dan-india-berpotensi-jadi-episenter-baru-covid>
- Ravel, S., & Kurniawan, A. (2020, APRIL 27). *Jumlah Pelanggar PSBB Jakarta Periode Awal Capai 32.300 Kendaraan*. Retrieved from KOMPAS.COM: <https://otomotif.kompas.com/read/2020/04/27/070200315/jumlah-pelanggar-psbb-jakarta-periode-awal-capai-32.300-kendaraan>
- Sarahan, S., & Rahim, R. N. (2020, JUNI 8). *PKPB berlalu, PKPP datang*. Retrieved from MYMETRO: <https://www.hmetro.com.my/utama/2020/06/587252/pkpb-berlalu-pkpp-datang>
- Shihab, N. (2020, APRIL 22). *Jokowi Diuji Pandemi: Didesak Mundur, Menkes Terawan Dipuji Jokowi (Part 1)*. Retrieved from Mata Najwa : <https://www.youtube.com/watch?v=JFHHzLixfXA>
- Syaodih, S. N. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan. Rosdakarya*.
- WHO. (2020). *What is a pandemic?* Retrieved from World Health Organization: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/en/